

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI



**AGUNG AM
105721134817**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan oleh:

AGUNG AM
NIM 105721134817

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Manajemen Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

06/01/2022

1 cap
Sub-Alumni

P/0029/MAN/22CP
AGU
s'

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah Tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendir (Q.S Ar-Ra,ad: 11)

“Bersemangatlal pada hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.”- HR. Muslim

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas Ridho-nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin.

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya dan saudara saya serta orang-orang sekitar yang baik kepada saya



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gowa"
Nama Mahasiswa : Agung Am
No. Stambuk/ NIM : 105721134817
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan Penguji Skripsi Strata (S1) pada tanggal 11 Desember 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

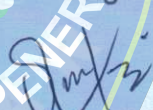
Makassar, 07 Jumadil Awal 1443 H
11 Desember 2021 M

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr Ahmad Ac., ST., M.M
NIDN. 0903076201

Pembimbing II

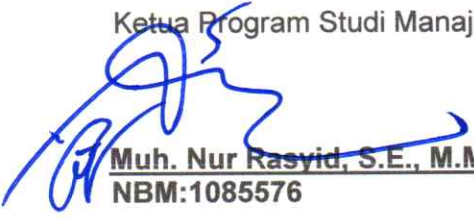

Sitti Marhumi, S.E., M.M
NIDN. 0901126906

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM:651507

Ketua Program Studi Manajemen


Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M
NBM:1085576



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Agung Am, NIM: 105721134817, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0014/SK-Y/61201-091004/2021, tanggal 07 Jumadil Awal H/ 11 Desember 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar SARJANA MANAJEMEN pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Jumadil Awal 1443 H
11 Desember 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr Buyung Romadhoni, SE., M.Si
2. Aulia, S.IP., M.Si.M
3. Syarthini Indrayani, SE., M.Si.
4. Ir. Muhammad Akib, MM

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr.H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agung Am

No. Stambuk/Nim : 105721134817

Program Studi : Manajemen

Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya
Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.**

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apa bila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 07 Jumadil Awal 1443 H

11 Desember 2021 M

pernyataan,



Agung Am

NIM: 105721134817

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651507

Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M
NBM: 1085576

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan yang tiada ternilai manakala penulisan Skripsi yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Di Kab. Gowa Tahun 2019.”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Baso Amir dan Sitti Marwah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus, Dan saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Muh. Nur Rasyid S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Ahmad Ac., St., M.M Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Sitti Marhumi, S.E., M.M. Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak/Ibu dosen beserta asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Kepada pihak kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gowa yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data, terutama kepada Ibu Nuzul Fitri, S.Th.I.,M.A.Hum dan Ibu Eka Herawati, SE.M.M yang sudah membantu dan memberikan dukungan secara moril kepada peneliti serta mengarahkan peneliti dalam proses pengambilan data
8. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Teman-Teman Fakultas Ekonomi dan bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2017 yang selalu belajar bersama terkhusus MAN 9
10. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukunganya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis seantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb



Makassar, 5 Oktober 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agung Am".

Agung Am

ABSTRAK

Agung Am, 2021 Strategi Komisi Pemilihan Umum KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Gowa Tahun 2019 Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh **Ahmad** dan **Sitti Marhumi**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Umum, dan mengetahui kendala apa saja yang sering terjadi pada pemilihan dan bagaimana solusi yang dilakukan KPU, dan juga menganalisis partisipasi masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan dengan teori dan filsafat adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif

Hasil penelitian yang didapat penulis dalam strategi komisi pemilihan umum KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di kabupaten Gowa tahun 2019 mengenai kendala yang sering di alami KPU dan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terkait dengan strategi KPU dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat sudah menjangkau hampir ke semua lokasi baik dataran rendah ataupun dataran tinggi, terkait dengan kendala yang di alami KPU ketika berjalanya Pemilu itu kembali kepada masyarakat sendiri untuk lebih peduli akan pentingnya hak suara untuk di pergunakan , dan juga harapanya masyarakat bisa menolak yang namanya politik uang.

Kata kunci : Strategi KPU, dan partisipasi masyarakat

ABSTRACK

Agung Am, 2021 *The Strategy of the General Election Commission of the KPU in Increasing Public Participation in the General Elections in Gowa Regency in 2019 Thesis of Management Study Program Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, Supervised by **Ahmad and Sitti Marhumi***

The purpose of this research is to find out the KPU's strategy in increasing public participation in the general election, and to find out what obstacles often occur in elections and how the solutions are carried out by the KPU, and also to analyze public participation in the General Elections Commission (KPU). Data collection techniques namely documentation and interviews. The type of research used is a research method using a qualitative approach based on theory and philosophy while the nature of this research is descriptive

The results of the research obtained by the author in the strategy of the KPU general election commission in increasing public participation in the general election in Gowa district in 2019 regarding the obstacles that are often experienced by the KPU and the KPU's strategy in increasing public participation, related to the KPU's strategy in increasing public participation has reached almost to all locations, both lowlands and highlands, related to the obstacles faced by the KPU during the election, it was returned to the people themselves to be more concerned about the importance of voting rights to be used, and also the hope that the public could reject money politics.

Keywords : KPU strategy, and community participation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viv
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian Strategi.....	5
B. Tingkat-tingkat Strategi.....	8
C. Tipe-tipe strategi.....	10
D. Pengertian Komisi Pemilihan Umum	11
E. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.....	11
F. Pengertian Pilkada	15
G. Partisipasi Masyarakat	15
H. Tinjauan Empires.....	22

I. Kerangka pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Peneltian.....	26
B. Fokus penelitian	26
C. Lokasi dan Situs Penelitian	27
D. Informan Penelitian Sumber Data.....	27
E. Fokus Penelitian Pengumpulan Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambar Umum Objek Penelitian	34
B. Hasil penelitian.....	43
C. Pembahasan.....	46
BAB V_PENUTUP	49
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1.	Jurnal Peneliti Terdahulu.....	22
Tabel 4.1	Data pemilu Kpu Kabupaten Gowa tahun 2019.....	42
Tabel 4.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa 2018.....	35



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	25
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Gowa.....	35
Gambar 4.2	Bagan Struktur Organisasi.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi yang selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai Negara demokrasi, yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi Negara berada di tangan rakyat.

Pemilihan Umum (KPU) merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus perwujudan demokrasi. Gelombang demokrasi yang melanda hampir setiap negara dibelahan bumi termasuk di Indonesia telah membawa perubahan dalam tatanan politik Indonesia. Demokrasi secara sederhana dapat dijelaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka pemilu adalah sebuah keniscayaan dinegara demokrasi.

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, pelaksanaan kedaulatan rakyat bisa di identikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin karena salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hak pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu sebagai bentuk

demokrasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya amandemen UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E yang memuat Tentang Ketentuan Pemilihan Umum.

Keterlibatan masyarakat dalam konstelasi pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitmasian para calon. Partisipasi masyarakat dalam pilkada menunjukkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Maka dari itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus terus dilakukan termasuk dalam memfasilitasi penyelenggara pilkada. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat di butuhkan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil serta sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan local di Indonesia". Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa "Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Secara umum dapat di gambarkan peran Komisi Pemilihan Umum yakni mengadakan sosialisai, fungsionalisai institusi pemerintahan secara proporsional, mampu membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan desk pemilu dan konsisten dalam pelaksanaan regulasi sehingga Komisi Pemilihan Umum juga semakin menegaskan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat termasuk membangun kesadaran politik masyarakat.

Maka dari itu untuk meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam pemilu pada Kabupaten Gowa kita mengajak masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam Pemilu ini, tujuannya juga tidak lain yaitu untuk terciptanya Pemilu yang adil, bersih, jujur dan terbuka. Sehingga Pemilu bisa terlaksana dengan lancar tanpa kendala.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tercantum di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa kendala yang sering muncul ketika sedang berjalan Pemilu pada Kabupaten Gowa jika dilihat dari Pemilu belakangan ini ?
2. Bagaimana tindakan KPU Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, adapun tujuannya yaitu :

1. Untuk mengetahui kendala KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum
2. Untuk menganalisis dan mengetahui strategi KPU Kab Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini bisa mendorong dan meningkatkan semangat masyarakat Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pada Pemilu

2. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan atau saran yang berguna bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Strategi

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampurkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Pengertian strategi juga terbagi atas dua bagian yaitu Umum dan Khusus :

Secara umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Secara khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan

kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Definisi-definisi strategi yang akan di kemukakan oleh para peneliti mempunyai banyak kesamaan, yaitu mengenai Frase “tujuan jangka panjang”, suatu perumusan dalam menentukan pemecahan masalah dan kebijakan umum yang di hadapi organisasi dalam menghadapi keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi serta penekanan pada “pola tujuan dan kerangka kerja”. Berikut akan dipaparkan oleh para ahli mengenai pengertian strategi. Seperti yang di jelaskan oleh Kuncoro (2005: 1-2) dalam buku yang berjudul “Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif” di jelaskan mengenai strategi menurut Itami, strategi merupakan penentuan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengordinasikan aktivitas sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan.

Sedangkan menurut Andrews, bahwa strategi merupakan pola sasaran, tujuan dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.

Kuncoro sendiri mendefinisikan strategi adalah pemimpin bisnis perusahaan merealisasikan filosofinya. Selanjutnya bahwa strategi seharusnya berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada “pola tujuan dan kerangka kerja” menyatakan bahwa strategi

berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menarik kembali.

Berbeda dengan pendapat David (2006: 17) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi dapat mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khusus untuk lima tahun dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal yang dihadapi oleh perusahaan.

Menurut Hit, Ireland dan Hoskisson, "Strategy is an integrated and coordinated set of commitments and actions designed to exploit core competencies and gain a competitive advantage." Terminologi strategi pada 20 mulanya berasal dari literatur mengenai perang. Dalam perspektif itu bisnis dimaknai sebagai pertempuran dan pesaing adalah musuh, sedangkan pemerintah berperan membuat dan melaksanakan berbagai aturan (Sampurno 2003: 03).

Sedangkan menurut Milles dan Snow et.,al dalam Kuncoro (2005: 88-89) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam menggunakan strategi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan pesaingnya dapat melalui beberapa strategi diantaranya yaitu:

1. Strategi Prospektor (Prospector) yaitu strategi yang mengutamakan pada keberhasilan organisasi dalam berinovasi, selalu menciptakan produk baru dan kesempatan pasar yang baru.

2. Strategi bertahan (Defender) yaitu perusahaan dengan strategi bertahan biasanya mementingkan stabilitas pasar yang menjadi targetnya.
3. Strategi Penganalisis (Analyzer) yaitu merupakan strategi analisis dan imitasi. Organisasi yang menggunakan strategi ini akan menganalisis ide bisnis baru sebelum organisasi untuk memasuki bisnis tersebut .
4. Strategi reaktor yaitu organisasi yang bereaksi terhadap perubahan lingkungan dan membuat suatu perubahan hanya apabila terdapat tekanan dari lingkungannya yang memaksa organisasi tersebut untuk berubah.

B. Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam salusu 2006: 101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhan disebut *Master Strategy*, yaitu *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*. Beberapa penulis lain seperti Wheelen dan hunger (dalam salusu 2006: 101) mengenal tiga tingkatan strategi saja, yang di dalamnya *corporate strategy* sudah mencakup *enterprise strategy*.

a. Enterprise strategy

Strategy ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintahan dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok mempunyai interes dan tuntutan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategy interprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat

luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

b. *Corporate strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digelut oleh suatu organisasi. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. *Business strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dilihat para penguasa, para anggota legislatif, Para donor, para politis. Dan sebagainya semua ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.

d. *Functionall strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

1. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat.
2. Strategi fungsioanal manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning organizing implementing, controlling, staffing, leading, motivation, communicating, decision making, refresenting dan integrating.

3. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau selalu berubah.

C. Tipe-tipe strategi

Dalam mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe strategi, Koteen (dalam Salusu 2006: 104) sesungguhnya tidak berbeda pandangan Higgins, Wheelen dan Hunger, meskipun mereka yang disebut terakhir ini mengklarifikasikan strategi itu kedalam apa yang disebut tingkat-tingkat strategi. Tipe-tipe strategi dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *Corporate strategy* (strategi organisasi).

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.

2. *Program stratgy* (strategi program).

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.

3. *Resource support strategy* (strategi pendukung sumber daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

4. *Institusional strategy* (Strategi Kelembagaan).

Fokus dari strategi instusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

D. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Ayat 7 pasal ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten//Kota adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi negara yang beposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedangkan lembaga negara utama disebut pula *main state organ*.

Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum bertugas dalam melaksanakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebelum pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkanya UU No, 4 Tahun 2000 anggota Komisi Pemilihan Umum diharuskan non partisipan .

E. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sedangkan pengertian KPU menurut UU No 15/2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 8 menyebutkan “ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota,

adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota". Untuk menyelenggarakan pemilu ditingkat kabupaten/kota, dibentuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota selama lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.

Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang yang terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai integritas, kompetensi dan kemampuan dalam melakukan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugas KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan KPPS. Jumlah anggota PPK sebanyak 5 orang, PPS sebanyak 3 orang, dan KPPS sebanyak 11 orang yang terdiri dari kalangan profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan mempunyai kemampuan dalam melakukan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan bukan anggota partai politik.

KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi lewat berbagai tahapan seleksi oleh Tim Seleksi KPU yang dibentuk dalam kalangan professional, akademisi dan masyarakat yang memiliki integritas. Sedangkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibu kota kecamatan, PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibentuk oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Pelaksanaan pemilu di tiap tingkat akan bertanggung jawab kepada lembaga yang membentuknya.

Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah lembaga yang berwenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, di setiap Provinsi, Kota/ Kabupaten. Tugas dan

wewenang KPUD berdasarkan Undang-undang no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu pada paragraf 3 pasal 10 ayat (3). Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Bupati/ Walikota meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

F. Pengertian Pilkada

Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Sejak sudah berlakunya UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat pemilukada.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat.

Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut :

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

G. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan

melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu.

Semua ini membawa kita pada persoalan pandangan bahwa pembangunan politik itu seharusnya sama dengan diciptanya lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi, Partisipasi rakyat dalam politik tentulah sangat dibutuhkan oleh negara yang menyatakan diinya sebagai negara demokrasi. Pendidikan politik rakyat, menurut merupakan unsur yang sangat penting bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik. Karena hal itu berguna untuk membutuhkan kesadaram, kemauan dan kemampuan berpolitik rakyat. Namun demikian, pada dataran praktis, upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan politik yang demokrasi tidak sedikit mengundang perdebatan, menyangkut strategi pengembanganya.

Pemilu menjadi indikator suatu negara berdemokrasi atau tidak, sebab sebuah negara yang memberikan keluasan warganya untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau perwakilan di parlemen menandakan negara tersebut telah berupaya berdemokrasi. Oleh karena itu, demokrasi melalui kegiatan Pemilu mensyaratkan warga untuk ikut terlibat dalam memberikan suaranya. Tanpa adanya upaya melibatkan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi kegiatan formalitas demokrasi.

Sebagian masyarakat masih meihat pemilu sebagai ajang pencapaian kekuasaan semata dan tak memberi manfaat untuk perbaikan kedepanya. Sebagian menilai para calon anggota legislatif suku mengambar janji yang tidak dipenuhi, akibatnya pada pelaksanaan pemilu, masyarakat kurang peduli kaena menganggap proses pemilu hanya buang-buang waktu dan tidak mempunyai manfaat. Masyarakat yang apatis berpandangan bahwa siapa pun yang bakal

terpilih menjadi anggota legislatif tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap hidupnya. Selain itu ada kelompok yang berpandangan bahwa calon anggota legislatif itu-itu saja kalau calon itu terpilih, maka akan sama saja dengan sebelumnya, sebagian penyelenggara pemilu KPU memiliki peran dalam melakukan sosialisai kesemua lapisan masyarakat, tak terkecuali pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat termarginalkan.

Makin tinggi tingkat partisipasi mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan, sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Peserta pemilu pada pilkada serentak dapat meningkatkan angka prestasi pemilih pada saat pencoblosan. Meskipun dalam pelaksanaannya, banyak sekali masalah-masalah yang ada di dalamnya, diantaranya yaitu partisipasi masyarakat yang selalu mengalami pasang surut, sudah dijelaskan bahwasanya penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan umum nasional yang diikuti penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah akan menjadi berita buruk bagi partai politik, terutama bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang. Partisipasi politik dalam pemilu adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Michael Rush dan Philip Althof (2012: 100) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik

- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demokrasi, dan sebagainya
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara.

Dalam sistem perwakilan, keterlibatan warganegara harus dapat membantu meyakinkan bahwa aparaturnegara berikap responsif terhadap ketentuan dan tuntutan yang terdapat diantaranya sebagian besar warga negara, ada dua pendekatan tentang keterlibatan warga negara yang telah dikembangkan yakni teori dan partisipatori:

1. Pendekatan elitis, menegaskan bahwa demokrasi adalah suatu metode pembuatan keputusan yang mengokohkan efisiensi dalam administrasi dan pembuatan kebijaksanaan namun menuntut adanya kualitas ketanggapan pihak penguasa dan kaum elit terhadap pendapat umum.
2. Pendekatan partisipatori, keterlibatan yang lebih tinggi, karena sangat diperlukan untuk mendatangkan keuntungan seperti ini kita harus menegaskan kembali demokrasi langsung.

KPU dalam mendorong partisipasi masyarakat melakukan pemetaan program peningkatan partisipasi melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisai informasi pemilu

Tujuanya untuk penyebarluasan informasi tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan dan mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Sosialisasi pemilu dilakukan kepada masyarakat melalui mobilitas sosial, media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan

budaya memudahkan masyarakat dapat menerima informasi pemilihan dengan baik .

2. Pendidikan politik

Tujuan membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik dilakukan melalui mobilitas sosial, pemanfaatan penjangkaran sosial, media lokal, pembentukan relawan demokrasi pemilihan serta bentuk-bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:55) pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Sedangkan Alfian (1992:235) mengemukakan pendapat berkaitan dengan pendidikan politik sebagai berikut, pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung pada suatu sistematis politik yang sangat ideal yang hendak di bangun.

Dengan penjelasan di atas, yang di kemukakan oleh Alfian sama dengan sosialisasi politik ,yaitu menyebarkan atau menyampaikan program-program pemerintah (penguasa) kepada masyarakat dalam suatu sistem politik, Senada dengan Alfian, Wahab (dalam Komarudin 2005:19) mengemukakan, bahwa pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Peningkatan partisipasi

Pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan, pada periode pemilihan, pendidikan pemilih, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan. Pada periode di luar pemilu, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan.

4. Peningkatan literasi politik

Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih. Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan dalam literasi politik dibutuhkan sebagai syarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilihan dan di luar periode pemilihan. Literasi politik yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah politik.

Adapun tujuan utama sistem perwakilan dalam negara adalah menyediakan sarana bagi para warga negara terbiasa melakukan kontrol tertentu terhadap pembuatan keputusan politik pada saat mereka tidak dapat secara langsung membuat keputusan itu sendiri, hal ini di dasari pemikiran para wakil rakyat tidak dapat mengabdikan seumur hidupnya, maka diciptakannya sarana lain berupa sistem pemilihan yang dapat dilakukan dengan periodik, sistem pemilihan merupakan salah satu ciri utama sistem demokrasi.

Dominasi mayoritas umumnya dianggap sebagai ciri utama dan paling penting dari sistem pemilihan, terhadap keinginan masyarakat. Dominasi mayoritas menimbulkan banyak persepsi, yang dapat di kualifisir, dominasi mutlak atau dominasi relatif.

Menurut Rahman (2007:288), tripologi partisipasi politik yaitu :

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output, Artinya setiap warga negara secara aktif mengusulkan mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk, membenarkan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain lain.

2. Partisipasi pasif

Partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

3. Golongan putih (Golput) Serangkai apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di inginkan.

Menurut Rahman (2007:289) model partisipasi politik terbagi dalam empat bagian yaitu :

1. Partisipasi Aktif

Jika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.

2. Partisipasi pasif (Apatis)

Sebaiknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif.

3. Militan (Radikal)

Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militan.

H. Tinjauan Empires

Dilihat dari pendekatan melalui peneliti sebelumnya (jurnal) diantaranya :

Tabel 2.1. Jurnal Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Petrus Gleko (2017)	Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Kepala Daerah.	Metode kualitati	Kendala strategi KPU Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu pada tahun 2015 antara lain : 1. Kurangnya dukungan untuk sosialisasi. 2. Kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU. 3. Keterbatasan sumberdaya
2.	Dwi haryono (2016)	Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015.	Metode Kualitatif	Strategi atau upaya yang dilakukan KPU Samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015 antara lain : strategi penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi politik.

3.	Sri Juniarti Hasibuan (2018)	Strategi komisi pemilihan umum KPU provinsi sumatera utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur sumatera utara 2018 (studi kasus di kota medan)	Metode kualitatif	Partisipasi masyarakat pada saat pemilihan gubernur sumatera utara merupakan suatu aspek yang sangat penting sehingga komisi pemilihan umum menggunakan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur sumatera utara.
----	------------------------------	--	-------------------	---

I. Kerangka pikir

Keikutsertaan masyarakat dalam konstelasi pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Maka dari upaya untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat harus terus dilakukan termasuk di dalam memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan undang-undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu menyebutkan bahwa "untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin kegiatan pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi suatu masyarakat untuk mendorong terlaksananya pemilihan umum

yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan local di Indonesai”.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuanya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sarana jangka panjang, penggunaan serangkaian peristiwa serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam salusu 2015:64) berargumen terdapat tiga indikator stratego, yaitu Formulasi dan target jangka panjang, yang ditandai dengan perencanaan yang mempertimbangkan bebrapa aspek yang penting berkaitan dengan kondisi daerah sekitar. Pemilihan tindakan, ditandai dengan pencapaian visi dan misi serta tujuan suatu organisasi dan sumber daya yang ditandai dengan mendukung terwujudnya suatu kegiatan. Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang makimal.

Penigkatan partisipasi Masyarakat dilakukan dengan Sosialisasi informasi pemilu, melalui dengan media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya melalui dengan media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya, Pendidikan politik, melalui prnjaringan sosial, pembentukan relawan demokrasi kepemiluan. Keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu, melalui penyusunan kebijakan atau peraturan keterlibatan dalam tahapan pemilu.

2.1 KERANGKA KONSEP



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada suatu filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Sifat penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Narkubo dan Achmad (2004:44) mengemukakan pengertian penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data jadi ia juga memberikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan cara yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena